



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Andana Haris Agamsa  
Assignment title: Jurnal  
Submission title: UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMP  
File name: Jurnal\_Andana\_Haris\_1.docx  
File size: 42.63K  
Page count: 14  
Word count: 4,400  
Character count: 32,356  
Submission date: 20-Jul-2023 02:51PM  
Submission ID: 2133963203

### ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Phil I Ketut Gunawan, MA.

NIP. 19631222 199002 1 001

#### UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMPROTEKSI E-COMMERCE DARI PRAKTIK PREDATORY PRICING TAHUN 2016 - 2023

Andana Haris Agamsa<sup>1</sup>

*Abstract: In February 2021, the hashtag #ShopeeBunuhUMKM (Shopee Kills SMEs) stirred controversy among SMEs in Indonesia. The government responded by investigating allegations of predatory pricing in Indonesian e-commerce. The research employed a descriptive design, gathering secondary data through literature review of books, journals, reports, and relevant internet sources. The research findings indicated that the Indonesian government implemented measures like regulatory drafting and summoning multinational corporations (MNCs) in response to the study. Predatory pricing in Indonesian e-commerce was primarily attributed to the absence of regulations governing imports in cross-border B2C e-commerce. This led to the proliferation of inexpensive imported goods through e-commerce platforms' promotions, significantly impacting local SMEs involved in the production and distribution of domestic products.*

*Keywords: Predatory Pricing, E-Commerce, SMEs, Shopee.*

#### Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan informasi menciptakan inovasi dalam perdagangan, termasuk lahirnya e-commerce sebagai hasil evolusi teknologi internet (AH Barkatullah, 2019). E-commerce adalah proses transaksi barang dan jasa secara online melalui perangkat elektronik yang terhubung internet (David VanHoose, 2001). Hal ini juga terkait dengan pertumbuhan perdagangan internasional dan kerjasama antarnegara untuk menghilangkan proteksi dalam perdagangan lintas negara (B Winarno, 2014).

Pemintaan tinggi terhadap barang impor mendorong persaingan di antara pelaku bisnis, yang mendorong mereka untuk menawarkan harga lebih rendah dan kualitas lebih baik (Sri Wahyuningsih, 2019). E-commerce dipilih sebagai sarana oleh importir karena biaya operasional yang rendah dan kemampuan untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Namun, hadirnya barang impor murah dan subsidi dari platform e-commerce dapat mengarah pada praktik persaingan yang tidak adil, seperti predatory pricing (H Kartajaya, 2013).

Pada tahun 2020, kasus predatory pricing terjadi dalam e-commerce di Amerika Serikat dan India. Kasus di Amerika Serikat melibatkan penawaran produk palsu murah yang mirip dengan merek terkenal (United States Trade Representative, 2020), sementara di India, beberapa platform e-commerce besar menawarkan diskon besar-besaran yang tidak dapat ditandingi oleh produsen lokal UMKM (India Today, 2020). Pada tahun 2021, Kementerian Perdagangan RI menemukan praktik predatory pricing dalam e-commerce, yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan dalam rapat nasional HIPMI (Sekretariat Kabinet RI, 2021). Temuan tersebut termasuk praktik predatory pricing pada produk hijab impor yang merugikan harga produk hijab UMKM di Jakarta (Titis Nurdiana, 2021).

Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi e-commerce dari praktik predatory pricing melalui penyusunan regulasi dan kebijakan proteksionisme. Penelitian dengan judul upaya pemerintah

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malawarman. E-mail: andanaharis550@gmail.com